

Mempertanyakan Roadmap Ekonomi Capres

27/04/2009 23:53:49 WIB



Oleh **Mudrajad Kuncoro***)

JAKARTA, INVESTOR DAILY

Sumber: http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60384

Pecahnya koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar menimbulkan ketidakpastian baru bagi pelaku pasar. Turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS, setelah keduanya sempat membaik, setidaknya perlu dijadikan peringatan bagi para calon presiden (capres). Apa pun peta koalisi antarpol dan siapa capres mendatang, para capres perlu menjabarkan *roadmap* ekonomi yang akan diterapkan bila mereka terpilih dalam pemilu presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat dipastikan akan melanjutkan program reformasi ekonomi yang telah dilakukan sejak 2004. Capres yang lain perlu mengkritisi sejauh mana reformasi itu membawa perubahan mendasar bagi mayoritas rakyat dan meletakkan landasan yang kuat bagi kebangkitan ekonomi Indonesia.

Sebelum pemilu legislatif 9 April lalu, kita tentu ingat pernyataan Megawati, ketua umum DPP PDIP, yang menyindir pemerintahan SBY seperti mainan yoyo, yang mempermainkan nasib rakyat karena menaikkan dan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan itu dibalas oleh kubu SBY, yang menyatakan permainan yoyo itu jauh lebih baik daripada pemerintahan Megawati yang diumpamakan seperti permainan gasing.

Permainan anak-anak yoyo memang naik turun, sedangkan gasing hanya berputar-putar saja di tempat, malah melubangi tanah. Perumpamaan ini karena saat menjabat menjadi presiden, Megawati dianggap gagal dan bahkan telah melepas pulau Sipadan dan Ligitan, serta beberapa BUMN strategis dijual kepada asing.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: mana yang benar, rakyat bertambah susah atau tambah sejahtera di era kedua Presiden RI terakhir ini? Apakah kebijakan negara di bawah pemerintahan Megawati dan SBY membawa perbaikan kinerja ekonomi, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan? Adakah keterkaitan antara pemilu dan perbaikan kesejahteraan rakyat?

Sejumlah indikator objektif perlu dicermati agar rakyat dapat menilai sejauh mana pencapaian suatu pemerintahan. Kekuasaan hanyalah 'alat' untuk menyejahterakan rakyat.

Pentingnya Indikator

Bila kita melihat angka-angka indikator ekonomi selama masa pemerintahan SBY dan Megawati boleh dikata kondisi perekonomian kita berada dalam kondisi cukup 'terkendali' meski bukannya tanpa gejolak

Ini terlihat setidaknya dari sejumlah indikator makro utama selama 2002-2008. Pertumbuhan ekonomi di era SBY tercatat rata-rata 5,9% per tahun, demikian juga laju pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor. Ketiga indikator ini jauh lebih tinggi dibanding masa Megawati yang masing-masing hanya 4,8%, 6,7%, 8,5% per tahun.

Perbaikan kinerja ekspor, investasi dan pertumbuhan ekonomi di era SBY lebih meyakinkan daripada di era Megawati. Selama pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan. Rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang pemerintah terhadap PDB juga terus menurun dari tahun ke tahun. Perbaikan kinerja neraca pembayaran bermuara pada peningkatan cadangan devisa yang cukup signifikan dari US\$ 34,7 miliar pada 2005 menjadi US\$ 51,6 miliar pada triwulan IV 2008, atau setara dengan empat bulan impor.

Kendati demikian, perlu dicatat, pemerintahan Megawati lebih unggul dalam meredam laju inflasi dan mengendalikan kurs rupiah terhadap dolar AS. Ini terlihat dari rata-rata laju inflasi di masa Megawati-y-o sebesar 8,2%, sementara laju inflasi di era SBY rata-rata sebesar 10,75%.

Di era Pemerintahan Megawati, kurs rupiah terhadap dolar AS terbukti lebih mampu dikendalikan dan cenderung menguat. Semasa Megawati menjabat menjadi presiden, rata-rata nilai kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 8.941/US\$1, sedangkan di masa SBY menjabat nilai kurs rupiah terhadap dolar rata-rata mencapai Rp 9.745/US\$1.

Tabel 1. Kinerja Presiden SBY Dibanding Era Megawati, 2002-2008 (rata-rata per tahun)

Indikator ekonomi & sosial	Megawati	SBY
	Tahun 2002-2004	Tahun 2005-2008
Pertumbuhan PDB (%)	4,8	5,9
Pertumbuhan Investasi Tetap (%)	6,7	9,3
Pertumbuhan Ekspor (%)	8,5	16,5
Laju Inflasi (%)	8,2	10,75
Suku Bunga SBI-1 bulan (%)	10,9	10,2
Nilai Tukar (Rp/US\$)	8.941	9.745
Kemiskinan (%)	17,2	16,5
Pengangguran (%)	9,62	9,77

Sumber: BI (2008); BPS (2008); Kemenko Perekonomian (2009)

Sayangnya, dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran, ternyata baik pemerintah SBY dan Megawati, tidak mencatat perubahan yang berarti. Pada masa pemerintahan Megawati, rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 17,2%, dengan jumlah orang miskin sekitar 36,1-38,4 juta selama 2002-2004. Pada masa

SBY, rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 16,5%, dengan jumlah orang miskin sekitar 35-39,3 juta selama 2005-2008.

Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran ternyata jauh di bawah target yang dijanjikan pada saat kampanye maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meningkatnya volume APBN terbukti tidak berkorelasi terhadap penurunan kemiskinan. Volume APBN meningkat 215% lebih, dari Rp 397 triliun pada 2005 menjadi Rp 855 triliun tahun 2008.

Anggaran negara untuk pengentasan kemiskinan juga meningkat 282,6% dari Rp 23 triliun tahun 2005 menjadi Rp 65 triliun tahun 2008. Namun, peningkatan alokasi anggaran yang demikian besar nyatanya tidak signifikan dengan dampaknya terhadap penurunan jumlah orang miskin dan tingkat kemiskinan.

Angka pengangguran juga tidak banyak berubah. Pada masa Megawati, rata-rata pengangguran per tahun sebesar 9,62%, sedangkan pada masa SBY sebesar 9,77%. Relatif tingginya angka pengangguran menunjukkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pascakrisis, yang di bawah 6,4%, belum mampu menyerap tambahan kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial.

Dari kedua indikator ini, yaitu kemiskinan dan pengangguran, ternyata kesejahteraan rakyat tidak banyak menunjukkan perbaikan selama masa pemerintahan SBY dan Megawati. Bahkan ketimpangan distribusi pendapatan antara golongan 40% berpenghasilan terendah dan 20% golongan berpenghasilan tertinggi di negeri ini makin melebar. Ini tercermin dari koefisien gini yang meningkat dari 0,33 pada 2002 menjadi 0,37 pada 2007. Dengan kata lain, baik SBY maupun Megawati 'gagal' dalam mengatasi melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Perlunya *Grand Strategy*

Oleh karena itu, tak ada gunanya para capres saling menjelekkkan satu sama lain. Rakyat tentu akan lebih menghargai bila para capres berintrospeksi, apa 'kesalahan' kebijakan di masa lalu dan menjabarkan bagaimana Indonesia akan dibawa lima tahun mendatang. Suatu *roadmap* dengan visi, *grand strategy*, dan target indikator yang jelas akan lebih bermanfaat memilih mana capres yang peduli dengan kesejahteraan rakyat, baik di daerah maupun nasional.

Saling serang dalam merebut popularitas sesaat demi 'politik pencitraan' merupakan hal yang kurang arif dilakukan, bahkan terkesan kekanak-kanakan. Hal itu justru akan mengerosi fondasi demokrasi yang sudah susah-susah dibangun.

Sejak 1998 hingga 2009, Indonesia memiliki empat presiden dengan gaya kepemimpinan dan memerintah yang berbeda. Masalahnya, apakah perubahan presiden dan anggota DPR juga membawa perubahan signifikan dilihat dari indikator ekonomi dan kesejahteraan?

Fokus perhatian perlu diarahkan pada bagaimana menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan strategi mengurangi dampak krisis keuangan global.

Memimpin dalam situasi krisis global tidaklah sama dengan situasi normal. Robby Djohan (2006) dalam buku *Leading in Crisis*, menggarisbawahi bahwa krisis menuntut *a no-nonsense leader*. Artinya, krisis menuntut pemimpin bekerja lebih keras, membuat keputusan yang tepat secara cepat, dan mampu mengimplementasikannya secara tegas. Implikasinya, pemilu memilih presiden pada Juli mendatang amat ditunggu apa menghasilkan pemimpin seperti ini?

Masalahnya, kebangkitan ekonomi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan segani membutuhkan 'jalan baru, mobil baru, atau sopir baru'?. 'Jalan baru' berarti *roadmap* atau RPJMN baru. Karena tak ada parpol yang

mampu meraih 25% suara, 'mobil baru' berupa koalisi parpol merupakan keniscayaan. Apa kita akan memilih 'sopir baru' ataukah 'sopir lama' bagi negara ini, pemilu memilih capreslah yang akan menentukan jawabannya.

*) Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM; Chief Economist PT Recapital Advisors;
<http://www.mudrajad.com>